

Tipologi Permasalahan Tata Ruang Bidang Pertanian Dalam Implementasi LSD
LP2B dan RTR Di Kab Bantul Untuk Mendukung Smart Farming
(Kasus : Kecamatan Bantul dan Kecamatan Imogiri)

INTISARI

Tanah memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama untuk aktivitas agraris dan ketahanan pangan. Namun, alih fungsi lahan sawah akibat urbanisasi menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sektor pertanian. Kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah diterapkan untuk mencegah alih fungsi lahan, tetapi implementasinya sering menghadapi kendala, seperti ketidaksesuaian antara peta kebijakan dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Ketidaksesuaian ini menimbulkan celah dalam perlindungan lahan sawah serta menciptakan ketidakpastian hukum di daerah seperti Kabupaten Bantul, yang bergantung pada sektor agraris.

Untuk mengatasi masalah ini, analisis *Geographic Information System* (GIS) digunakan sebagai alat strategis dalam mendukung perencanaan tata ruang. GIS memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian peta LSD, LP2B, dan RTR melalui analisis overlay. Selain itu, GIS mendukung klasifikasi tipologi permasalahan tata ruang bidang pertanian, yang mencakup identifikasi permasalahan fungsi lahan dan pengelompokan masalah RTR bidang perumahan atau permukiman yang tumpang tindih dengan LSD maupun LP2B. Dengan pemetaan tipologi ini, pemerintah dapat memahami pola dan akar permasalahan, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi muncul di masa depan.

Integrasi analisis GIS dengan kebijakan LSD, LP2B, RTR, serta tipologi permasalahan tata ruang memungkinkan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat menyusun perencanaan berbasis data yang lebih efektif. Pendekatan ini memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di tengah tantangan urbanisasi.

Kata kunci: Kab. Bantul, LSD, LP2B, RTR Perumahan, Tipologi Permasalahan.

Tipologi Permasalahan Tata Ruang Bidang Pertanian Dalam Implementasi LSD
LP2B dan RTR Di Kab Bantul Untuk Mendukung Smart Farming
(Kasus : Kecamatan Bantul dan Kecamatan Imogiri)

INTISARI

Tanah memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama untuk aktivitas agraris dan ketahanan pangan. Namun, alih fungsi lahan sawah akibat urbanisasi menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sektor pertanian. Kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah diterapkan untuk mencegah alih fungsi lahan, tetapi implementasinya sering menghadapi kendala, seperti ketidaksesuaian antara peta kebijakan dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Ketidaksesuaian ini menimbulkan celah dalam perlindungan lahan sawah serta menciptakan ketidakpastian hukum di daerah seperti Kabupaten Bantul, yang bergantung pada sektor agraris.

Untuk mengatasi masalah ini, analisis *Geographic Information System* (GIS) digunakan sebagai alat strategis dalam mendukung perencanaan tata ruang. GIS memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian peta LSD, LP2B, dan RTR melalui analisis overlay. Selain itu, GIS mendukung klasifikasi tipologi permasalahan tata ruang bidang pertanian, yang mencakup identifikasi permasalahan fungsi lahan dan pengelompokan masalah RTR bidang perumahan atau permukiman yang tumpang tindih dengan LSD maupun LP2B. Dengan pemetaan tipologi ini, pemerintah dapat memahami pola dan akar permasalahan, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi muncul di masa depan.

Integrasi analisis GIS dengan kebijakan LSD, LP2B, RTR, serta tipologi permasalahan tata ruang memungkinkan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat menyusun perencanaan berbasis data yang lebih efektif. Pendekatan ini memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di tengah tantangan urbanisasi.

Kata kunci: Kab. Bantul, LSD, LP2B, RTR Perumahan, Tipologi Permasalahan.